Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun atau Lebih

Authority of Regional Supervisory Council of Notary on The Notary Protocol That Are 25 Years or Older

Dwi Kukuh Verdyandika*, Shinta Hadiyantina & Endang Sri Kawuryan

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Indonesia

*Corresponding Email: kukuh.verdyandika@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prosedur yang ideal dalam penyerahan protokol notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih kepada MPD serta bagaimana konsep sanksi yang ideal terhadap MPD atas tidak diserahkannya protokol notaris tersebut. Guna mendekati masalah ini dipergunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*). Data-data dikumpulkan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya sosialisasi mengenai protokol notaris yang berumur 25 tahun atau lebih oleh MPD kepada notaris, memberikan jangka waktu 30 hari dalam penyerahan protokol tersebut yang kemudian MPD mencatat dalam *database* dan menyimpannya di kantor yang representatif agar memudahkan jika suatu saat notaris perlu mengeluarkan salinan akta ataupun *grosse*.

Kata Kunci: Majelis Pengawas Daerah; Notaris; Protokol Notaris.

Abstract

This paper aims to examine the ideal procedure for submitting a notary protocol that are 25 years old or older to the MPD and how the concept of an ideal sanction against the MPD for not submitting the notary protocol. In order to approach this problem, a conceptual approach and a statute-approach approach are used. The data was collected through a study of the prevailing laws and regulations or those applied to a particular legal issue and then analyzed qualitatively. This study concludes that there is a need for socialization regarding the protocol of notaries that are 25 years old or older by MPD to notaries, give a period of 30 days in the submission of the protocol which then MPD records it in the database and stores it in a representative office to make it easier if at any time the notary needs to issue a copy of the deed or grosse.

Keywords: Regional Supervisory Council; Notary; Notary Protocol.

How to Cite: Verdyandika, D.K. Hadiyantina, S. & Kawuryan, E.S. (2021). Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun atau Lebih. *Jurnal Mercatoria*, Desember 2021. 14 (2): 77-87.

PENDAHULUAN

Republik "Indonesia sebagai negara hukum memiliki prinsip dalam menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang bertumpu atas kebenaran dan keadilan (Adonara, 2016), hal tersebut dijelaskan dalam dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Negara harus hadir dalam menjamin itu semua di dalam kehidupan masyarakat. Notaris sebagai bagian dari negara, yang diberikan kewenangan dalam membuat akta otentik dan turut membantu dalam menjamin kepastian hukum, serta perlindungan hukum yang dimana wewenang tersebut telah diberikan oleh negara."

Notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT) memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik yang dimana akta tersebut merupakan akta yang nyata, dan keasliannya tetap ada bahkan sampai meninggalnya notaris (Nico, 2003). Ketentuan atas kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN).

Notaris, jika ditinjau dari sistem hukumnya, maka dapat dibedakan menjadi notaris *civil law* dan notaris *common law*. Notaris *civil law* adalah notaris yang berasal dari Italia utara dan Indonesia, notaris *civil law* adalah diangkat oleh pejabat yang berwenang dan bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Sedangkan, notaris *common law* merupakan notaris yang terdapat di Inggris dan negara-negara Skandinavia (Yuana, 2010). Notaris *common law* dapat dicirikan atas akta yang dibuat tidak dalam bentuk tertentu, dan juga tidak ditunjuk oleh pejabat yang berkuasa (Darus, 2017)."

Notaris bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap pembuatan dan pengesahan akta otentik. Dalam jabatannya, notaris bertugas memberi

pelayanan kepastian hukum dalam bentuk pembuatan akta otentik maupun pembuatan akta tanah (Darusman, 2016). Kepastian hukum di sini berupa pengesahan dan penguatan atas pengikatan-pengikatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat."

Selain itu, notaris memiliki kewenangan dalam menyimpan protokol notaris. Sebagai bagian dari wewenang dan tanggung jawabnya, maka Notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan protokol tersebut dan merahasiakannya sebagaimana telah diatur di Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Suatu upaya untuk menjaga umur yuridis dari akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak maupun ahli warisnya tentang segala sesuatu yang termuat di dalam akta tersebut adalah dengan melakukan penyimpanan protokol notaris oleh notaris pemegang protokol (Wirastuti dan Hartanto, 2017).

Sementara itu, untuk mengawasi tugas dan kewenangan notaris terdapat Majelis Pengawas Daerah Notaris (selanjutnya disebut MPD). MPD bertugas dalam mengawasi kinerja dari seluruh notaris di kabupaten atau kota. MPD menjadi bagian yang sangat penting bagi keberlangsungan profesi notaris. Oleh karena itu, MPD merupakan ujung tombak Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang melaksanakan pengawasan langsung terhadap notaris (Trisnomurti & Suryawan, 2017).

MPD menjadi yang terdepan dalam mengawasi notaris secara langsung karena wewenang yang dimilikinya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 70 UUJN bahwa MPD memiliki wewenang untuk memeriksa protokol notaris, menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, dan menunjuk notaris untuk memegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara.

Karena panjangnya masa berlaku dari akta otentik maka penyimpanan protokolnya perlu diatur, terutama terhadap akta otentik yang sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun sejak para pihak menandatangani. Mengenai hal ini, penyimpanan protokol notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) atau lebih kemudian diatur di dalam Pasal 63 ayat 5 UUJN *juncto* Pasal 70 huruf e UUJN.

Pasal 63 ayat 5 UUJN menyebutkan bahwa Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Sementara di Pasal 70 huruf e UUJN memberi amanah bahwa MPD memiliki wewenang dalam menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Aturan ini menunjukkan bahwa MPD harus melakukan penyimpanan setiap protokol notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. MPD selaku pengawas memiliki kebijakan untuk menentukan di mana protokol notaris tersebut disimpan. Ketentuan dari pasal ini belum memberi kejelasan terkait bagaimana MPD menjalankan tugasnya dalam menentukan tempat penyimpanannya.

Sejak berlakunya UUJN di tahun 2004 hingga saat ini, masih belum terdapat peraturan pelaksana dari UUJN yang secara khusus mengatur tentang bagaimana pelaksanaan dari Pasal 63 ayat 5 dan Pasal 70 huruf e UUJN. Tidak adanya peraturan pelaksana membuat MPD tidak memiliki pijakan (dasar hukum) dalam mengambil kebijakan. Akibatnya tidak ada standar operasional prosedur atau mekanisme dalam penyerahan protokol notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Ketika protokol notaris tidak diserahkan oleh notaris kepada MPD, tidak ada ketentuan sanksi yang diberikan

baik kepada notaris maupun MPD. Kondisi seperti ini membuat ketentuan dari Pasal 70 huruf e UUJN menjadi tidak memiliki kekuatan atau daya paksa terhadap notaris dan MPD.

Pasal 63 ayat 5 dan Pasal 70 huruf e UUJN yang belum memiliki aturan pelaksana ini merupakan sebuah kekosongan hukum. Oleh karena itu perlu adanya aturan yang pasti terkait bagaimana mekanisme dan standar operasional prosedur dalam penyerahan protokol notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, termasuk juga bagaimana tanggung jawab MPD terhadap protokol tersebut.

Berdasarkan pada permasalahan yang diuraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang prosedur yang ideal dalam penyerahan protokol notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih kepada MPD. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prosedur yang ideal dalam penyerahan protokol notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih kepada MPD serta bagaimana konsep sanksi yang ideal terhadap MPD atas tidak diserahkannya protokol notaris tersebut.

Hasil penelitian Yuhana (2020) tentang Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap penyimpanan Protokol Notaris yang telah berumur 25 tahun serta mengetahui tanggung jawab dari Notaris Penerima Protokol terhadap Protokol Notaris yang berumur 25 tahun menunjukkan bahwa pertama kewenangan Majelis Pengawas Daerah belum berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut dikarenakan terkendala sarana dan prasarana penyimpanan Protokol Notaris, kedua tanggung jawab Notaris Penerima Protokol terhadap Protokol Notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun yang telah diterimanya yaitu menyimpan, menjaga, dan merawat agar Protokol-Protokol tersebut tetap tersimpan dengan aman agar tidak mudah rusak dan hilang

karena Protokol Notaris merupakan arsip Negara yang harus tetap ada.

Hasil penelitian Turrahma (2020) tentang “Akibat Hukum Kelalaian Ahli Waris Notaris tidak menyerahkan protokol yang telah memasuki usia 25 tahun atau lebih kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD)”, menunjukkan bahwa akibat hukum kelalaian ahli waris Notaris tidak menyerahkan Protokol Notaris paling lama 30 hari, maka MPD berwenang untuk mengambil protokol Notaris sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 63 ayat (6) UUJN. Kewenangan MPD menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih sebagaimana diatur di Pasal 70 huruf e UUJN.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Istyaningrum (2019) tentang tanggung jawab Notaris pemegang Protokol terhadap Protokol Notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyerahan Protokol Notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun kepada Majelis Pengawas Daerah tersebut bersifat untuk menjadikan Protokol Notaris dapat disimpan di satu tempat yang aman dan dapat dijaga dengan benar, karena berkaitan dengan Protokol Notaris tersebut adalah sebuah alat bukti otentik, dimana minuta akta yang disimpan dalam protokol Notaris tersebut bisa kapan saja dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan alat bukti, karena Notaris, Notaris pengganti dan Pejabat Sementara Notaris berkewajiban serta bertanggung jawab secara penuh terhadap setiap akta yang dibuatnya, meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Terkait dengan kewenangan pengeluaran *Grosse*, Salinan dan Kutipan akta, maka tergantung terhadap Majelis Pengawas Daerah, karena berdasarkan Pasal 70 huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris yaitu Majelis Pengawas Daerah berwenang menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Maka apabila Protokol tersebut tetap disimpan oleh Notaris pemegang Protokol yang pertama, maka dialah yang berwenang mengeluarkan *grosse*, Salinan dan kutipan akta, namun jika Protokol Notaris tersebut disimpan di Kantor Majelis Pengawas Daerah maka yang berwenang adalah Majelis Pengawas Daerah.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum kepustakaan sebagai jenis penelitiannya (Ibrahim, 2006). Dalam penelitian normatif ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*). Data-data dikumpulkan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur yang Ideal dalam Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun atau Lebih kepada MPD

Dalam kewajibannya selain membuat akta otentik, notaris juga mempunyai kewajiban dalam hal penyimpanan, melakukan tugas pelaporan dan pengarsipan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pekerjaannya yang disebut protokol notaris, yaitu minuta akta, daftar akta yang telah dikeluarkan, daftar legalisasi surat-surat di bawah tangan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, daftar *klapper*, daftar surat wasiat, dan lain-lain yang berhubungan dengan pekerjaannya. Dokumen Protokol notaris tersebut merupakan dokumen penting yang termasuk arsip negara yang harus dijaga keasliannya dan dijaga dari kerusakan atau kehilangan, hal tersebut karena sewaktu-

waktu bisa diperlukan oleh penghadap atau ahli warisnya untuk hal-hal yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang sebagai pembuktian. Oleh karena itu, Protokol tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris pemegang Protokol, dan akan tetap berlaku sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara (Triwulan & Widodo, 2011).

Pada Pasal 1 angka 13 UUJN definisi dari protokol/arsip penting notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, dalam hal ini protokol notaris bisa diartikan sebagai suatu bundel berkas penting milik negara yang wajib dilindungi, disimpan, dijaga dan dirawat oleh Notaris menurut aturan yang ada di undang-undang. Sebagai salah satu dari arsip atau dokumen penting milik negara maka sudah menjadi kewajiban bagi notaris, notaris pengganti, notaris pemegang protokol dan MPD untuk menjaga, merawat dan menyimpan dokumen tersebut dalam keadaan atau kondisi bagaimanapun juga meski notaris si pemilik protokol tengah cuti atau/bahkan telah meninggal dunia."

Mengenai "penyerahan protokol notaris telah diatur dalam Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 dan juga di Pasal 65 UUJN. Menurut Pasal 63 ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa dilakukan paling lambat 30 hari dengan membuat berita acara penyerahan dalam penyerahan dokumen penting notaris. Pasal 63 ayat (3) menyatakan bahwa penyerahan tersebut dilaksanakan oleh notaris atau ahli warisnya kepada notaris lain yang telah ditunjuk MPD. Sementara itu, dalam pasal 63 ayat (5) menjelaskan bahwa dokumen penting notaris yang telah berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun diserahkan oleh notaris yang menerima protokol dari notaris lain kepada MPD."

Oleh karena itu, dalam penyerahannya, protokol notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih memang harus

diserahkan ke MPD sesuai dengan Pasal 63 ayat (5) UUJN, akan tetapi faktanya tidak dilaksanakan dengan baik (Sunaryanto, 2018). Karena Pasal 63 ayat (5) UUJN tidak dilaksanakan maka Pasal 70 huruf e UUJN, yang mengatur tentang kewenangan MPD untuk menetapkan lokasi menyimpan kumpulan dokumen penting notaris yang waktu diserahkan sudah berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun atau seperempat abad, juga otomatis tidak juga bisa dilaksanakan. Padahal penyimpanan arsip penting negara (kumpulan dokumen penting notaris), harus selalu memperhatikan faktor keamanan protokol tersebut dari resiko kerusakan, dengan cara seksama dan penuh kehati-hatian perlu dijaga agar tidak rusak, sobek, tercecer, rusak karena usia atau dimakan serangga, atau bahkan hilang."

Oleh sebab itu, jika permasalahan ini diruntut, maka penyebab tidak terlaksananya aturan Pasal 63 ayat (5) UUJN/UUJN-P dan Pasal 70 huruf e UUJN, adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Sosialisasi yang dilakukan MPD

Salah satu alasan yang membuat tidak terlaksananya aturan Pasal 63 ayat (5) UUJN/UUJN-P dan Pasal 70 huruf e UUJN, adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh MPD. Beberapa notaris bahkan tidak mengetahui bahwa protokol notaris yang diterimanya harus diserahkan kepada MPD ketika sudah berusia 25 tahun atau lebih (Firmanzah, 2011)

2. Faktor Aturan UUJN/UUJN-P

Pertama, dalam UUJN terdapat beberapa aturan yang dianggap memberatkan notaris dan MPD. Misalnya Pasal 57 UUJN menyebabkan pelaksanaan dalam menyimpan protokol yang sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih akan jadi hal yang merepotkan bagi notaris, hal tersebut karena adanya aturan di UUJN Pasal 57 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dapat mengeluarkan Kutipan Akta, Salinan, Grosse Akta, ataupun pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang tersimpan dalam protokol Notaris hanyalah

Notaris yang membuatnya, Notaris pengganti, atau pemegang protokol notaris yang sah. Oleh karena hal tersebut, maka akan merepotkan MPD dan Notaris jika protokol yang sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tersebut disimpan di kantor MPD.

Kedua, terkait dengan kurang jelasnya aturan yang termuat dalam Pasal 63 ayat (5) yang menyatakan bahwa Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah, dan Pasal 63 ayat (6) yang menyatakan bahwa Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

Terkait dengan Pasal 63 ayat (5) yang menyatakan bahwa notaris penerima protokol notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih harus menyerahkan protokol notaris tersebut kepada MPD, tidak ada aturan penjelasan yang menyatakan mengenai penghitungan waktu 25 tahun itu dihitung berdasarkan tanggal penandatanganan akta atau dihitung berdasarkan bulan penandatanganan akta. Selain itu, dalam Pasal 63 ayat (6) tidak dijelaskan dalam aturan penjelasan terkait dengan sanksi yang diterima oleh notaris yang tidak menyerahkan protokol notarisnya kepada MPD, dan tidak ada aturan sanksi yang dikenakan kepada MPD yang tidak mengambil protokol notaris. Sehingga tidak ada sanksi atau daya paksa ini membuat MPD abai dalam tanggung jawabnya untuk mengambil protokol notaris dan menyimpannya.

3. Faktor Tempat Penyimpanan

Salah satu alasan lain MPD tidak melakukan penyimpanan protokol notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih secara baik dan mandiri yaitu dikarenakan MPD tidak memiliki cukup tempat ataupun kantor yang dapat menampung semua Protokol notaris. Sehingga atas dasar ini, banyak

dokumen yang sudah berusia seperempat abad tetap ada di kantor notaris pemegang protokol notaris lain. Meski terkadang notaris penyimpan atau pemegang protokol notaris lain juga merasa keberatan karena protokolnya sendiripun juga semakin tahun semakin banyak (Sunaryanto, 2018)."

Berkaitan dengan terbatasnya tempat penyimpanan, seharusnya MPD yang telah dibentuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia disediakan tempat ataupun gedung yang representatif karena tugas MPD sangat vital salah satunya untuk menyimpan protokol-protokol notaris yang merupakan arsip negara. Tentang hal ini sebenarnya sudah ada di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Majelis Pengawas (susunan organisasi, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, dan tata kerjanya) pada Pasal 18 ayat (5) tetapi masalahnya adalah tempat/ruangan yang terkadang tidak representatif atau dinilai terlalu kecil untuk menyimpan protokol notaris yang tentu jumlahnya sangatlah banyak. Oleh karena itu, berikut prosedur yang ideal dalam dalam penyerahan Protokol Notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih kepada MPD.

Gambar 1. Prosedur yang ideal dalam penyerahan Protokol Notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih kepada MPD

Berdasarkan hasil penelitian yang diketahui bahwa masih banyak notaris yang

belum mengetahui jika ketika notaris menerima protokol notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih harus diserahkan ke MPD. Maka dari itu, sudah menjadi tanggung jawab MPD untuk lebih gencar melakukan sosialisasi baik melalui pertemuan rutin maupun melalui *workshop* dan webinar yang diselenggarakan. Hal ini bertujuan supaya aturan yang telah disahkan oleh UU dapat diketahui dan dilaksanakan dengan baik."

Dengan adanya sosialisasi tersebut, maka diharapkan bagi notaris penerima protokol notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih dapat menyerahkan kepada MPD. Apabila dalam jangka waktu 30 hari, notaris penerima tidak menyerahkan protokol notaris kepada MPD, maka MPD berwenang untuk melakukan pengambilan protokol notaris tersebut. Setelah protokol notaris ada di tangan MPD, maka MPD mencatat protokol notaris tersebut pada *database* yang dimiliki. Tujuan dari hal ini adalah supaya terdapat data yang akurat terkait protokol notaris yang ada di tangan MPD.

Setelah dilakukan pencatatan, maka tentu tugas selanjutnya adalah melakukan penyimpanan. Penyimpanan yang ideal adalah di kantor MPD. Dalam hal ini kantor MPD diharapkan representatif terhadap banyaknya protokol notaris yang disimpan, sehingga protokol notaris dapat terawat dengan baik. MPD dalam hal ini juga bertanggung jawab untuk melakukan perawatan secara berkala untuk menjaga kondisi dari protokol notaris yang sudah cukup tua supaya tidak rusak.

Namun, ada beberapa kondisi yang mengharuskan protokol notaris untuk dikeluarkan sementara, yaitu dipinjam oleh notaris pembuat, notaris penerima atau pihak-pihak yang berwenang terhadap protokol notaris untuk membuat salinan akta, *groose*, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pihak-pihak tersebut dapat melakukan peminjaman sementara kepada MPD. MPD harus selalu mencatat setiap protokol notaris yang keluar supaya nantinya MPD dapat mengambil dan memberikan sanksi apabila notaris tidak mengembalikannya. Demikian dengan MPD

yang tidak menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya dengan baik, maka berhak dikenakan sanksi, yang mana sanksi dalam hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam sub-bab selanjutnya.

Konsep Sanksi yang Ideal terhadap MPD atas Tidak Diserahkannya Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 (Dua Puluh Lima) Tahun atau Lebih

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 'sanksi' adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya). Dalam konteks penelitian ini sanksi merupakan hukuman untuk memaksa MPD menaati ketentuan undang-undang yaitu UUN. Sementara kata ideal sebagaimana tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehendaki. Dari pengertian tersebut, maka sanksi yang ideal memiliki makna hukuman yang sangat sesuai untuk memaksa MPD menaati ketentuan UUN.

Ada beberapa macam sanksi dalam penegakan hukum, yaitu sanksi keperdataan, sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam hal ini, yang disebut unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, adanya kesalahan, dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum di sini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian.

Dalam hukum administrasi sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat

hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma administrasi negara (Ridwan HR, 2003). Sementara itu, Philipus M. Hadjon dan H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbelt (1990) berpendapat bahwa sanksi administrasi meliputi:

1. Paksaan pemerintah (*bestuurdwang*)
2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin pembayaran, subsidi),
3. Pengenaan denda administratif dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

Sedangkan sanksi pidana menurut Herbert L Packer (1967) diartikan sebagai suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman.

Sanksi pidana sendiri telah diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri atas: Pidana pokok (pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan dan pidana denda) dan Pidana tambahan (Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu dan Pengumuman putusan hakim).

Dalam hal penyimpanan Protokol notaris, hal tersebut tentu berperan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Penegasan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan f UUJN jelas mewajibkan setiap Notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris dan mewajibkan setiap Notaris untuk mengeluarkan *Grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta atas permintaan para pihak atau para ahli waris dari para pihak.

Notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan protokol notaris sampai dengan rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan jika lebih dari 25 tahun, maka harus diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk

menyimpannya. Dengan adanya MPD yang menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, maka hal ini turut membantu notaris dalam menjalankan kewajibannya.

Tersimpannya protokol notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih membutuhkan peran penting dari MPD. Hal ini sebagaimana telah diatur di dalam dua pasal yang saling berkaitan di atas. Wewenang yang dimiliki MPD ini menjadi bagian dari kewenangan administratif yang dilaksanakan oleh Ketua, Wakil Ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD. Kewenangan yang bersifat administratif ini salah satunya adalah dalam hal menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih dengan memberikan persetujuan kepada Notaris sebagai pemegang protokolnya sendiri maupun sebagai pemegang protokol Notaris lain untuk tetap menyimpan protokol notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tersebut. Tujuannya agar protokol notaris tersebut tetap tersimpan dengan baik guna dapat mengeluarkan salinan akta demi kepentingan pihak-pihak yang membutuhkan.

Namun, penelitian Okta Jony Firmanzah (2011) menunjukkan bahwa MPD kurang memperhatikan tanggung jawabnya dalam melakukan pengambilan, penyimpanan, dan perawatan terhadap protokol Notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih. Selain itu, MPD juga kurang memperhatikan penyimpanan dan perawatan protokol notaris yang berusia lebih dari 25 tahun, sehingga kondisi dari protokol notaris tersebut banyak yang telah rusak dan lapuk.

Tidak adanya pengaturan mengenai sanksi yang diberikan kepada MPD merupakan salah satu hal yang membuat lainnya MPD terhadap pengelolaan

protokol notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih. Konsekuensi ketiadaan pengaturan tentang prosedur penjatuhan sanksi hukum (sesuai hukum acara) terhadap MPD yang tidak menjalankan tanggung jawabnya, berakibat timbulnya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat. Dampak yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum, dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh. Kondisi seperti ini menyebabkan kebingungan dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan (Soekanto dan Purbacaraka, 1993). Maka dari itu, jika hal tersebut terjadi, hak Notaris dan para pihak yang terkait tidak memperoleh pemeriksaan yang adil serta tidak memberikan perlindungan hukum.

Membahas mengenai sanksi, di dalam UUJN hanya ada sanksi yang diberikan kepada notaris. Sanksi ini diberikan kepada notaris apabila telah melakukan pelanggaran atau tidak menjalankan kewajibannya. Di dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai sanksi terdapat beberapa jenjang sanksi yang diberikan. Di antaranya antara lain: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan terhadap Notaris karena melanggar pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 7 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58 dan Pasal 59.

Dalam UUJN, pengaturan sanksi administratif telah disebutkan yaitu dengan menempatkan teguran tertulis pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan pemberhentian sementara, jika sanksi seperti ini tidak dipenuhi juga oleh Notaris

yang bersangkutan, maka dapat dijatuhkan sanksi berikutnya secara berjenjang. Penerapan ketentuan pasal di atas tentunya harus memperhatikan tingkat berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Notaris, dalam arti bahwa penerapan sanksi tersebut sifatnya berjenjang. Hal ini berbeda dengan MPD, di mana UUJN tidak mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada organ pengawas notaris ini khususnya dalam hal penyimpanan protokol notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.

Pengaturan sanksi yang ada pada profesi notaris dapat pula diterapkan pada MPD atas tidak dijalankannya kewajiban terhadap protokol notaris yang berumur 25 (dua puluh lima tahun atau lebih). Pengaturan mengenai sanksi terhadap MPD ini nantinya dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang diterbitkan.

Pengaturan mengenai sanksi yang diusulkan oleh penulis memiliki kaitan dengan tugas MPD sebagai badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Dalam Pasal 68, Pasal 69 angka (1), Pasal 72 angka (1) dan Pasal 76 angka (1) UUJN, menjelaskan ada beberapa tingkatan Majelis Pengawas Notaris, di antaranya yaitu Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkedudukan di kota atau kabupaten; Majelis Pengawas Wilayah Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi; dan Majelis Pengawas Pusat Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 71 UUJN, Majelis Pengawas Daerah Notaris memiliki

kewajiban yang berkaitan dengan protokol notaris, dua diantaranya antara lain:

1. Mencatat dalam buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah Akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
2. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis pengawas Pusat.

Sehingga, jika dikaitkan dengan protokol notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih, maka MPD wajib mencatat, memeriksa, dan melakukan pelaporan secara berkala kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis pengawas Pusat. Melalui laporan secara berkala yang dilakukan oleh MPD tersebut, maka MPW akan mengetahui apakah MPD telah menjalankan tugasnya terkait pengelolaan protokol notaris seperti yang termuat dalam Pasal 70 e UUJN.

Melalui laporan MPD kepada MPW, maka MPW dalam hal ini dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja MPD terhadap pengelolaan protokol notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih. Ketika, MPD terbukti tidak menjalankan tugasnya dalam pengelolaan protokol notaris seperti yang termuat dalam Pasal 70 e UUJN, maka MPW dapat memberikan sanksi kepada MPD. Sanksi diberikan oleh MPW karena MPW merupakan lembaga yang berada di atas MPD dan berhubungan langsung dengan MPD. Selain itu, MPW memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengevaluasi, dan memberikan sanksi kepada MPD. Sanksi yang diberikan oleh MPW kepada MPD ini terdiri dari 4 tahapan, di antaranya yaitu:

1. Teguran

2. Peringatan tertulis
3. Pemberhentian jabatan MPD sementara
4. Pemberhentian jabatan MPD secara tetap

Pemberian sanksi tersebut berlaku untuk pengurus MPD yang diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan, penyimpanan, dan perawatan terhadap protokol notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih. Selain itu, sanksi juga dapat diberlakukan kepada ketua dan wakil MPD (tergantung beratnya kasus) karena ketua dan wakil MPD merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap jalannya kinerja MPD. Sehingga ketika sanksi yang diberikan telah mencapai tahapan ketiga, maka MPW harus menunjuk pihak lain untuk mengisi kekosongan jabatan MPD secara sementara, dan apabila sanksi yang diberlakukan telah mencapai pada tahapan keempat, maka MPW harus menunjuk pihak lain untuk mengisi kekosongan jabatan dalam MPD secara tetap.

SIMPULAN

Prosedur yang ideal dalam penyerahan protokol Notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih kepada MPD antara lain yaitu perlu adanya sosialisasi yang lebih gencar oleh MPD kepada notaris. Ketika protokol notaris memasuki umur 25 (dua puluh lima) tahun, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari harus diserahkan kepada MPD yang selanjutnya MPD mencatat ke dalam *database* dan menyimpannya di kantor MPD. Apabila dalam beberapa kondisi tertentu yang mengharuskan protokol notaris dikeluarkan sementara namun tidak dikembalikan, maka notaris dapat diberi sanksi dan demikian dengan MPD.

Sementara itu, konsep sanksi ideal terhadap MPD atas tidak diserahkannya protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih antara lain melakukan laporan berkala atas protokol notaris berumur 25 tahun/lebih

oleh MPD kepada MPW yaitu sanksi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pemberhentian jabatan MPD sementara dan terakhir pemberhentian jabatan MPD secara tetap.

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, disarankan agar MPD melakukan tinjauan ulang atas sosialisasi kepada notaris mengenai protokol notaris yang berumur 25 tahun atau lebih oleh MPD, dan memberikan jangka waktu 30 hari dalam penyerahan protokol tersebut. Kemudian untuk memudahkan notaris dalam mengeluarkan salinan akta ataupun *grosse*, maka MPD perlu mencatat dalam *database* dan menyimpannya di kantor yang representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, F.F. (2016). Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris. *Jurnal Perspektif*. XXI (1).
- Barus, Z. (2014). Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*. 13(2): 313.
- Darus, M.L.H.D. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta: UII Press.
- Darusman, Y.M. (2016). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Jurnal Hukum Adil*. 7 (1).
- Firmanzah, O.J. (2011). Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Tugas dan Jabatan Notaris (Studi di Jakarta Timur). *Tesis*. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- H D Van Wijk, H.D.V/Konijnenbelt, W. (1990). *Hoofdstukken van Administratief Recht*. Utrecht: Uitgeverij Lemma BW.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Istyaningrum, D. A. (2019). Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Notaris Lain yang Berumur 25 Tahun atau Lebih. *Disertasi*. Universitas Sebelas Maret.
- Marzuki, P.M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Nico. (2003). *Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center For Documentation and Studies of Business Law (CDSBL).
- Packer, H.L. (1967). *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford California University Press.
- Ridwan, H.R. (2003). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Soekanto, S. & Purbacaraka, P. (1993). *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunaryanto, H. (2018). Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. 2 (2).
- Trisnomurti, R. & Suryawan, I.G.B. (2017). Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi terhadap Notaris. *Jurnal Notariil*. 2 (2).
- Triwulan, T. & Widodo, H.I.G. (2011). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Turrahma, Z. (2020). Akibat hukum kelalaian ahli waris notaris tidak menyerahkan protokol yang telah memasuki usia 25 tahun atau lebih kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). *Tesis*, Universitas Pelita Harapan.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Wirastuti, B.A. & Hartanto, J.A. (2017). Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan oleh Ahli Waris kepada Notaris Lain. *Al-Qānūn*. 20 (2).
- Yuana, I.E. (2010). Tanggung Jawab Notaris Setelah berakhir Masa Jabatannya terhadap akta yang dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Tesis*. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Yuhana, D.A. (2020). Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap Penyimpanan Protokolnotaris yang Telah Berumur 25 Tahun. *Tesis*. Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.